

Mengangkat kerja layak

bagi lanjut usia yang menekuni solusi berbasis alam di Indonesia



Yainur Pratomo

Daftar Isi

- 2 Pendahuluan
- 4 Ragam Pekerjaan NbS
- 5 Defisit Kerja Layak dalam NbS
- 14 Kesimpulan dan rekomendasi

Pesan Kunci

- Sesuai pengertiannya, solusi berbasis alam (NbS) menjanjikan beragam manfaat lingkungan dan sosial bagi lanjut usia (semisal, keamanan pangan yang baik). Namun, pekerjaan NbS bukanlah tanpa tantangan.
- Terlepas dari kontribusinya terhadap lingkungan, penduduk lanjut usia di Jawa Tengah menekuni pekerjaan NbS secara informal, sehingga kerap dibayar murah atau bahkan sukarela dengan keamanan kerja, penghasilan, dan perlindungan sosial yang kurang memadai.
- Pekerjaan NbS ditandai dengan rendahnya keselamatan kerja, lantaran infrastruktur kurang memadai dan tuntutan fisik pekerjaan yang tinggi.
- Meski sebagian besar lanjut usia bercita-cita untuk menambah keterampilan, melakukan pekerjaan selain kerja manual, mereka tidak mempunyai cukup kesempatan untuk pengembangan diri.
- Stereotip dan diskriminasi berdasarkan usia (ageisme) kian marak, menyerukan kegentingan untuk mengangkat masalah ini di masyarakat dan menciptakan inisiatif yang memberdayakan lanjut usia.
- Dialog sosial masih jarang ditemui di wilayah perdesaan. Sehingga, harapan petani lanjut usia untuk mengubah bagi-hasil dalam sistem penyakapan cenderung terabaikan.
- Standar ekolabel, meski menawarkan kelestarian alam, juga bisa mengabaikan peluang pendapatan lanjut usia, terutama dalam jual beli hasil hutan non-kayu.
- Kebijakan ketenagakerjaan, meliputi pekerjaan NbS, yang sejalan dengan Program Kerja Layak Nasional Indonesia perlu dirancang dan diterapkan demi memastikan hak-hak lanjut usia tetap dihormati.

Pendahuluan

Di wilayah perdesaan, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, pekerjaan solusi berbasis alam (NbS), terutama pertanian dan kehutanan, berkontribusi pada ekonomi hijau dan berpeluang menciptakan lapangan kerja di sektor informal. NbS sendiri berarti penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan manusia sekaligus pelestarian dan pemulihan ekosistem.^{1,2}

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia berkembang pesat meski tetap menyisakan beragam tantangan. Guna mempercepat perkembangan ekonomi hijau, Pemerintah Indonesia kerap menegaskan kembali komitmennya di berbagai kesempatan, termasuk pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.³ Komitmen yang diperbarui ini selaras dengan harapan dunia yang dijabarkan dalam Perjanjian Paris. Pada 2022, Indonesia memperkuat target iklimnya dengan meningkatkan pengurangan emisi gas rumah kaca dari 29 persen menjadi 31,89 persen tanpa syarat. Khususnya di sektor kehutanan dan tata guna lahan lain, Indonesia menjanjikan pengurangan sebesar 17,4 persen tanpa syarat dan 25,4 persen dengan dukungan bersyarat.⁴

Peristiwa iklim yang terjadi bertahap di Indonesia, disusul cuaca ekstrem, telah menjadi ancaman besar bagi penghidupan masyarakat. Risiko banjir dan tanah longsor telah menambah kegentingan untuk pemulihan hutan yang terdegradasi dan lahan-lahan bertanah gersang. Terkait dengan peristiwa iklim tersebut, Indonesia tengah mengalami kekeringan panjang yang berdampak buruk pada keanekaragaman hayati dan mata pencaharian masyarakat lokal. Guna mengangkat persoalan tersebut, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim pada 2014 terbit dengan tujuan untuk membentuk ketangguhan menghadapi perubahan iklim, memastikan generasi mendatang menikmati lingkungan dan hak asasi manusia yang lebih baik.⁵ Di dalam rencana nasional ini, ketangguhan ekosistem bertujuan untuk melestarikan hutan, sementara ketangguhan sistem penghidupan bertujuan untuk memperkuat mata pencaharian, sekaligus aspek sosial dan budayanya. Wanatani menjadi salah satu sektor kunci penyumbang ketangguhan ekosistem dan sistem penghidupan ini.

Kajian lingkungan menunjukkan bahwa pemulihan alam melalui wanatani memberi beragam manfaat, termasuk peningkatan kesuburan tanah, konservasi keanekaragaman hayati, dan produktivitas tanaman musiman.^{6,7,8,9} Pemerintah Indonesia telah mendukung tata guna lahan setempat seperti wanatani di hutan rakyat dengan menyediakan bibit pohon kayu berusia pendek dan buah-buahan, serta menawarkan bantuan bagi mereka yang ingin terlibat ke dalam perdagangan kayu ekolabel. Namun, pemerintah belum memberi dukungan memadai untuk hasil hutan non-kayu, yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar lanjut usia dan rumah tangga mereka.

Menekuni pekerjaan NbS, seperti memulihkan daerah tangkapan air atau reboisasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan mengurangi erosi tanah, seyogyanya bisa menekan kemiskinan perdesaan.¹⁰ Namun, pekerjaan NbS yang ada saat ini justru menghadapi tantangan serius lantaran kerap tidak berbayar dan dinilai murah. Beragam pekerjaan NbS ini terkait erat dengan ekonomi informal, sehingga seseorang bisa melakukan pekerjaan tanpa dilindungi undang-undang ketenagakerjaan dan/atau tidak dimasukkan ke dalam skema perlindungan sosial.¹¹

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Indonesia pada Agustus 2023, sekitar 53,93 persen lanjut usia masih aktif bekerja.¹² Temuan yang dihimpun SurveyMETER dan HelpAge pada 2023 menunjukkan bahwa pengusaha perempuan berusia lanjut seringkali bekerja dalam waktu yang panjang, menghadapi tantangan fisik, seperti pernafasan, maupun tantangan ekonomi di perdesaan. Perempuan lanjut usia ini juga kerap bekerja tanpa jaminan sosial dan tabungan pensiun, serta hampir separuh dari mereka belum pernah menerima bantuan pemerintah selama 12 bulan terakhir.¹³ Meski begitu, Indonesia telah berkomitmen terhadap agenda kerja layak, termasuk diterapkannya Program Kerja Layak Nasional (2020-2025). Indonesia berjanji melakukan peralihan ekonomi informal ke formal¹⁴ untuk mengurangi ketimpangan pendapatan perdesaan, di mana 52,82 persen penduduk lanjut usia-nya bekerja di sektor pertanian, dan 85,25 persen berada di sektor informal.¹⁵



Mengingat konteks di atas, kajian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan baru yang menggambarkan pengalaman lanjut usia. Demi mencapai tujuan itu, kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, seperti tinjauan pustaka, wawancara mendalam, diskusi kelompok terpumpun (FGD), serta sekumpulan studi kasus. Hipotesis kami, partisipasi lanjut usia dalam pekerjaan NbS mempunyai watak bergender dan tampaknya dianggap sukarela dan kurang dihargai.

Wilayah Kajian

Kajian ini dilakukan pada Desember 2023 sampai Januari 2024, di wilayah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo dikenal dengan jumlah penduduk lanjut usia yang relatif tinggi, kira-kira mencapai 129 ribu jiwa atau 16,51 persen dari total penduduk, lebih besar daripada rata-rata 13,07 persen di Jawa Tengah.^{1,6} Dua puluh satu wawancara mendalam dilakukan terhadap empat belas informan lanjut usia dan tujuh informan kunci yang merupakan pengelola kelembagaan NbS berbasis komunitas. Semua informan yang terlibat telah memberi persetujuan untuk diwawancarai dan direkam.

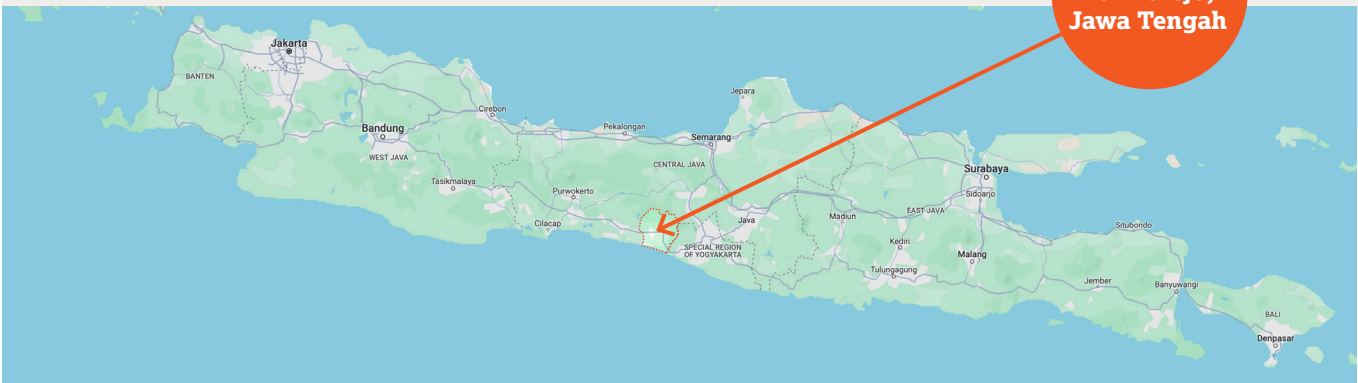


Table 1: Kata kunci yang di pakai

Kata kunci	Pengertian
Solusi berbasis alam (NbS)	NbS mempengaruhi seseorang dalam memanfaatkan alam dan, karenanya, ekosistem yang sehat untuk mampu melindungi manusia, mengoptimalkan infrastruktur, dan menjaga masa depan yang kukuh dan beraneka ragam. ¹⁷
Kerja layak	Kerja layak merangkul harapan bagi banyak orang tentang kehidupan kerja mereka. Hal ini meliputi kesempatan kerja yang produktif, memberikan penghasilan yang adil, menyediakan keamanan di tempat kerja, dan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja untuk mengembangkan diri dan mengintegrasikan diri dengan kehidupan sosialnya, bebas untuk mengekspresikan pendapat, berorganisasi dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan pekerja, dan kesempatan untuk mendapat perlakuan setara baik perempuan maupun laki-laki. ¹⁸
Peristiwa iklim yang terjadi bertahap (slow onset events)	Peristiwa iklim yang terjadi secara bertahap ini mengacu pada risiko dan dampak akibat peningkatan suhu, pengurangan, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan dan hutan, lapisan es yang mencair dan dampak lain seperti pengasaman air laut, kenaikan muka air laut, dan salinisasi. ¹⁹
Peristiwa cuaca ekstrem	Cuaca ekstrem merupakan peristiwa langka di suatu tempat dalam kurun tahun tertentu, dengan ciri-ciri yang tidak biasa dalam hal besaran, lokasi, waktu, atau durasinya. Ciri-ciri dari cuaca ekstrem ini bisa beragam tergantung kondisi satu tempat, dibanding keadaan biasanya. ²⁰
Ageisme	Ageisme ini mengacu pada stereotip (cara kita berpikir), prasangka (cara kita menduga) dan diskriminasi (cara kita bertindak) terhadap orang lain maupun diri sendiri berdasarkan usia. menjaga

Ragam Pekerjaan NbS

Di perdesaan Purworejo, dari generasi ke generasi, lanjut usia bergantung pada alam untuk memenuhi penghidupan mereka. Mata pencaharian kelompok usia lanjut di tempat ini ialah mengambil hasil hutan non-kayu dan produksi pertanian. Banyak kegiatan mereka berdampak positif bagi kelestarian lingkungan, baik memulihkan kesuburan tanah, konservasi keanekaragaman hayati, dan mengurangi polusi udara, tanah, dan air lewat pengelolaan sampah. Tabel 1 menyediakan ringkasan beragam pekerjaan NbS yang dilakukan lanjut usia di kabupaten Purworejo.

Table 2: Ragam pekerjaan NbS yang dilakukan lanjut usia di Kabupaten Purworejo

Desa	Pekerjaan NbS	Keterangan
Kedung Pucang, Bener, Purworejo	<i>Pertanian padi organik</i>	Pertanian padi organik skala kecil telah berkembang pesat, dan terlibat aktif dalam sertifikasi organik Lesos sejak 2021. ²¹ Dengan menggunakan tenaga kerja keluarga, cara bertani ini mampu meningkatkan keanekaragaman hayati dan mengintegrasikan co-produksi dengan hewan ternak demi memperkaya unsur hara tanah. ²² Dinas Pertanian telah membantu kelompok tani dalam proses sertifikasi, mengakui kegigihan mereka dalam memulihkan nutrisi tanah dari bahaya bahan kimia. Petani lanjut usia di Kelompok Tani Barokah Tani memulai proses ini, didampingi petani muda, memperkenalkan pertanian organik skala kecil dengan menggunakan pupuk kandang dan pertukaran varietas padi galur murni.
Karangrejo, Loano, Purworejo	<i>Inisiatif konservasi pada hutan rakyat</i>	Istilah hutan rakyat lebih menekankan hutan dengan kepemilikan pribadi, membedakannya dengan hutan negara. Banyak lanjut usia yang terlibat dalam hutan rakyat memanfaatkan jasa ekosistem dari hutan seperti melestarikan pepohonan dan konservasi air. Ada 44 lanjut usia laki-laki yang terlibat dalam kelompok hutan rakyat, namun lanjut usia perempuan jarang terlibat di kelompok tersebut.
Tanjungrejo, Ngombol, Purworejo	<i>Pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui bank sampah</i>	Bank sampah di desa tidak semata-mata mengumpulkan dan mengelola sampah di lingkungan setempat saja, tetapi juga dari desa tetangga supaya bisa memperoleh penghasilan layak. ²³ Para lanjut usia dilibatkan dalam menyeter sampah terpilah dan menerima pembayaran untuk itu. Ada 21 lanjut usia yang terlibat dalam pengumpulan sampah terpilah: dua belas lanjut usia perempuan dan sembilan lanjut usia laki-laki.
Gedangan, Purwodadi, Purworejo	<i>Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui konservasi tanaman mangrove dan ekowisata masyarakat</i>	Di Gedangan, ada dua kelompok berbasis komunitas yang bernama kelompok sadar wisata dan Kelompok Tani Demang Gede. Perhatian pemerintah terhadap inisiatif tersebut juga semakin besar seiring keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pelatihan pengelolaan wisata. ²⁴ Ada sebelas lanjut usia laki-laki yang terlibat di kedua kelompok ini; sebagian mengelola wisata, dan sebagian ikut penanaman mangrove.

Defisit Kerja Layak dalam NbS

Wilayah perdesaan, seperti dilaporkan Organisasi Buruh Internasional (ILO), tengah mengalami defisit kerja layak, semisal pendapatan rendah yang seringkali jauh dari upah minimum nasional, kesempatan kerja musiman yang tidak pasti, tenaga kerja keluarga yang tidak pernah dihitung, dan rendahnya imbal balik pertanian.^{25,26}



Yainur Pratomo

NbS seyogyanya mengangkat keragaman tantangan ekonomi dan sosial, demi meningkatkan mata pencaharian, keamanan pangan, modal sosial, dan kelestarian alam. Selain itu, NbS mempunyai potensi untuk menciptakan lapangan kerja secara signifikan di wilayah perdesaan, tentunya dengan melibatkan lanjut usia lantaran mereka mempunyai keterikatan lebih besar pada alam. Akan tetapi, perlu diakui bahwa dalam jangka waktu dekat maupun menengah, NbS pun bisa menampilkan risiko tertentu dalam pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Terdapat sejumlah tantangan untuk memastikan bahwa lapangan kerja yang tercipta dalam NbS mampu menjadi suatu pekerjaan layak.

Kajian ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar pekerjaan NbS dilakukan secara sukarela, kerap dipandang sebagai layanan ke masyarakat, cenderung musiman, dan/atau hanya sementara waktu saja. Ragam pekerjaan ini, secara khusus terlihat di pertanian dan kehutanan, serta sebagian besarnya bergantung pada tenaga kerja manual, yang berwatak informal dan tidak dibayar atau memiliki imbalan sangat rendah.

Kajian ini menemukan dua tantangan utama yang dihadapi pekerja lanjut usia, antara lain absennya kebijakan ketenagakerjaan dan ageisme di antara angkatan kerja. Pekerjaan NbS yang sudah ada belum mampu memperbaiki defisit kerja layak.

kami mendiskusikan secara khusus temuan-temuan terkait dengan tantangan kerja layak di wilayah kajian.

Kurangnya imbal balik, penghasilan rendah, dan ketidakamanan pendapatan

Seperti disampaikan sebelumnya, lanjut usia di Purworejo melakukan pekerjaan NbS yang cenderung dinilai murah atau bersifat sukarela. Watak kerja seperti ini terjadi di hutan rakyat dan pertanian organik bersertifikat. Bagi petani gurem atau petani tak bertanah, bekerja di NbS sering memperoleh imbal balik yang rendah. Begitu pula, konservasi mangrove cenderung dilakukan secara sukarela, dan lanjut usia perempuan yang terlibat di NbS menganggap pemilahan sampah sebagai tanggungjawab domestik tak berbayar.

Di Bener, kelompok tani bernama Barokah Tani memulai pertanian padi organik skala kecil pada 2016. Mulanya, pemerintah memberikan bantuan untuk kelompok tani dengan memasok pupuk cair organik, memberi jeda untuk memampukan petani melanjutkan pemupukan dengan pupuk kandang dari kotoran ternak mereka. Butuh waktu empat tahun sampai kelompok tani tersebut memperoleh sertifikasi organik sebagai bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.²⁷ Adanya sertifikasi organik ini diharapkan mampu meningkatkan harga produk-produk pertanian. Walaupun, masalah tenurial lahan masih menghambat kemampuan petani untuk memperoleh manfaat dari sertifikasi organik. Hasil panen ternyata hanya cukup untuk konsumsi rumah tangga dan karenanya mereka terpaksa melakukan banyak pekerjaan informal demi mencukupi kebutuhan lainnya.

“Sebagian besar petani lanjut usia yang terlibat dalam pertanian organik merupakan petani penyakap dan tidak memiliki sawah. Jadi mereka hanya menerima separuh dari total hasil panen untuk konsumsi sehari-hari; jumlah beras organik untuk diperjualbelikan menjadi sangat terbatas [...] Harganya pun tidak sebanding karena kita harus memilah beras utuh, dan butuh waktu sampai dua jam untuk satu kilogram beras, dihargai 20 ribu rupiah (sekitar \$1,2 USD).”

Informan Kunci

“Untuk dijual di pasar organik, beras harus berbentuk biji-bijian utuh supaya bisa mendapatkan harga 20.000 rupiah per kilogram [...] Setiap musim panen, kita biasa memanen sampai tiga kuintal yang wajib dibagi separuh ke saudara-saudara saya. Jadi, saya hanya mendapat 1,5 kuintal, atau tiga karung (sekitar 60 kilogram), untuk produksi pertanian di atas 25 ubin (350 meter persegi). Artinya, saya hanya mendapat penghasilan sekitar 780 ribu rupiah (sekitar \$50 USD) dari pertanian organik setiap musimnya.”

Laki-laki, 68 tahun, peserta kajian

Defisit kerja juga bisa diamati di hutan rakyat Loano, Purworejo.

Disamping watak kerja NbS yang dibayar murah, kajian ini juga menemukan bahwa beberapa praktik NbS dilakukan secara sukarela lantaran kegiatan ini dipandang sebagai layanan sosial daripada pekerjaan. Contohnya, bank sampah berbasis komunitas melibatkan anggota keluarga lanjut usia, terutama perempuan untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang dijual ke bank sampah demi mendapatkan sejumlah kecil uang. Bank sampah ini diprakarsai kelompok beranggotakan sepuluh perempuan (dasawisma), dari organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mempengaruhi sepuluh perempuan lainnya di kelompok dasawisma untuk mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga.



“Uang dari sampah rumah tangga bisa dikumpulkan sebagai tabungan (di bank sampah) dan kemudian dipakai untuk membayar pajak tanah. Ya, jumlah uang itu memang hanya cukup untuk pajak tanah karena saya biasanya menerima sekitar 40.000 rupiah (\$2,5 USD) setahun. Imbalan paling tinggi yang pernah saya terima ialah 300.000 rupiah (\$19 USD) setahun.”

Laki-laki, 70 tahun, peserta kajian

Konservasi mangrove ternyata juga dilakukan secara sukarela. Inisiatif ini mendapatkan investasi berbasis komunitas dari kontribusi iuran rumah tangga dan dukungan finansial dari dana desa. Di awal, inisiatif mangrove berbasis komunitas ini tampak menjanjikan sebagai sebuah kesempatan bisnis yang layak, lantaran selama puncak musim liburan, destinasi wisata ini bisa menghasilkan 4-5 juta (sekitar \$247-309 USD). Namun, Pandemi COVID-19 telah berdampak buruk bagi proyek penanaman mangrove, termasuk destinasi wisata, dan kini tengah tahap pemulihan. Sayangnya, sebagai dampak dari kesalahan pengelolaan di masa lalu, usaha ekoturisme mangrove ini gagal untuk mengkompensasi kontribusi komunitas dan juga membayar upah pekerja.

“Wisata mangrove memang mempunyai manfaat bagi lingkungan, sebab di sela-sela pohon bakau, biota laut seperti kepiting, udang, ikan akan melimpah. Namun, untuk memberi upah, tidak ada satupun yang membayar saya, tidak ada sama sekali! Saya mengumpamakan seperti saat bekerja sebagai tim SAR; saya tidak dibayar, saya justru mengeluarkan uang. Tetapi, saya bahagia.”

Laki-laki, 60 tahun, peserta kajian



Ciptaningrat Larasiti

Kurangnya Perlindungan Sosial

Melalui Program Kerja Layak Nasional 2020-2025, Indonesia telah berkomitmen untuk mengikutsertakan pekerja informal ke dalam program perlindungan sosial. Mereka yang dikategorikan sebagai kelompok lanjut usia rentan juga diikutsertakan ke dalam program perlindungan sosial non-iuran seperti subsidi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Sejahtera-Lanjut Usia (PKH-Lansia), serta bantuan asuransi sosial seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan-Penerima Bantuan Iuran (BPJS-PBI). Namun, partisipasi lanjut usia di dalam program perlindungan sosial ini masih belum merata. Selain itu, perlindungan sosial juga kerap dimengerti sebagai amal.

Salah seorang informan kunci di hutan rakyat, sekaligus kepala desa, menyebutkan:

“Beberapa warga lanjut usia merupakan penerima manfaat PKH-Lansia dan BPNT. Akan tetapi, belum ada perhatian khusus bagi mereka yang terlibat di sektor kehutanan [...] Istri saya selalu mendonasikan 5 kg beras, gula, dan teh kepada 90 lanjut usia setiap hari raya Idul Fitri.”

Laki-laki, 60 tahun, peserta kajian



Paolo Nicoletto/Unsplash

Kurangnya program perlindungan sosial dan asuransi kesehatan yang komprehensif untuk mendukung lanjut usia yang menekuni pekerjaan NbS mempunyai konsekuensi serius. Lantaran ketidakmampuannya untuk mengakses layanan kesehatan, beberapa lanjut usia yang mengikuti BPJS-PBI, terkadang entah tidak dapat mengakses atau tidak punya pilihan selain menghentikan perawatan kesehatan yang diperlukan. Informan dari komunitas hutan rakyat yang tidak terdaftar dalam PKH-Lansia maupun BPNT menyoroti kesulitan untuk mengakses skema ini.

“Sebelumnya, saya terdaftar di KIS, bisa disebut juga BPJS-PBI. Akan tetapi, hal itu hanya berlangsung selama beberapa tahun saja. Tujuh tahun lalu, saya menjalani operasi katarak pada mata kiri dengan menggunakan sistem KIS. Sayangnya, kartu tersebut sudah tidak berlaku lagi pada pemeriksaan kesehatan untuk katarak kedua. Saya diminta berkonsultasi dengan kantor BPJS. Meski saya berkeinginan untuk menjalani pemeriksaan katarak untuk mata kanan, saya mendapati bahwa kartu BPJS saya sudah habis masa berlakunya. Saya kesulitan menjadwalkan pemeriksaan mata ke kantor BPJS.”

Laki-laki, 84 tahun, peserta kajian

“Saya tidak menerima bantuan apa pun dari pemerintah, sama sekali tidak menerima, dan tidak tahu apa-apa.”

Perempuan, 70 tahun, peserta kajian yang terlibat di bank sampah

Dalam hal jaminan sosial bagi pekerja (BPJS-Ketenagakerjaan), sebagian besar petani mengaku tidak diikutsertakan ke dalam asuransi tersebut meski partisipasi mereka sebagai pekerja informal di perdesaan telah dipromosikan oleh BPJS-Ketenagakerjaan ke dalam program Kerja Layak di Indonesia.

“Saya tidak memiliki jaminan hari tua (bagian dari BPJS-Ketenagakerjaan). Jadi, jika saya sakit dan tidak bekerja di kemudian hari, saya harus bergantung pada perawatan anak-anak saya.”

Laki-laki, 70 tahun, peserta kajian

Keselamatan Kerja yang Kurang Memadai

Idealnya, pertanian organik dapat menjadi contoh baik dalam menjamin keselamatan kerja, mengurangi paparan input pertanian kimia yang berbahaya. Namun, temuan kajian ini menunjukkan bahwa lanjut usia masih menghadapi beragam risiko keselamatan kerja saat menekuni pekerjaan NbS. Pertama, petani lanjut usia menghadapi tantangan fisik lantaran curahan kerja intensif di pertanian, termasuk mengangkat beban berat atau membungkuk saat menanam padi, yang bisa menyebabkan kelelahan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Saat tenaga kerja muda semakin berkurang, beberapa tugas pertanian (semisal menanam dan mencangkul) diserahkan kepada petani tua, yang mesti bekerja sejak pukul 7 pagi hingga jam 4 sore, dengan tuntutan kerja fisik yang besar.

“Sekalipun saya harus terjatuh di sawah atau jalanan yang licin, saya akan tetap bertani. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Pekerjaan saya adalah petani. Sampai penghujung usia, saya akan tetap bekerja karena saya tidak ingin merepotkan anak-anak.”

Laki-laki, 71 tahun, peserta kajian

Kedua, kurang memadainya kondisi infrastruktur jalan dan kesiapsiagaan bencana di dataran tinggi di mana hutan rakyat berada membuat lanjut usia semakin rentan. Memperbaiki infrastruktur jalan di hutan rakyat merupakan keharusan, terutama bagi lanjut usia yang sehari-hari bergantung pada sepeda motor dan berjalan kaki sebagai sarana transportasi utama. Di wilayah pesisir, ekosistem mangrove yang berlumpur dalam dengan cangkang siput yang tajam menjadi tantangan tersendiri bagi lanjut usia untuk menekuni konservasi mangrove.

“Sulit bagi perempuan lanjut usia untuk bisa mengikuti penanaman mangrove, sebab tanahnya berlumpur sampai ke lutut. Kalau saya sendiri, selama tidak terlalu lama membungkuk untuk menanam mangrove, saya akan baik-baik saja. Sebenarnya, saya tidak mampu berdiri normal setelah terjatuh dari pohon kelapa [...] Selain banyak cangkang tajam di lumpur yang dapat merobek kaki kita, ada juga hewan-hewan berbahaya seperti ular dan tawon. Dalam kondisi seperti ini, saya hanya bisa memakai sepatu biasa padahal seharusnya sepatu boots, tapi saya tidak punya.”

Laki-laki, 60 tahun, peserta kajian

STUDI KASUS

Berjuang dengan keselamatan kerja di pertanian organik

Mbah Ponito (Laki-laki, 71 tahun) menyampaikan rasa puasnya dalam menekuni pertanian organik serta otonominya untuk memenuhi pupuk kandang dan mendapatkan bibit padi galur murni secara swasembada. Kerja pertanian lainnya, seperti pembibitan dan penanaman padi galur murni, juga dibantu oleh pekerja lanjut usia. Mbah Ponito berhasil untuk menyeimbangkan antara jerih payah dan kepuasan; dia puas menanam benih padi dengan tangannya sendiri. Saat musim tanam, setiap hari, ia ke sawah sejak pukul 07.00 pagi hingga 16.00 sore. Ia mengamati bahwa menutupi satu petak kecil sawah pembibitan dengan kain bekas sebelum menabur bulir benih bisa memudahkan proses pemindahan bibit padi yang tumbuh berikutnya. Ia juga belajar untuk mengurangi paparan bahan kimia pertanian melalui penggunaan enceng gondok sebagai penyaring air irigasi dan tanaman penghalang sebagai penyaring pestisida. Namun, dalam hal keselamatan kerja, kondisi kerja di sekitar sawah miliknya sungguh lah rentan. Jalan menuju sawah masih tanah, tidak beraspal, dengan ukuran sekecil saluran irigasi. Cukup sulit bagi sepeda, yang sering dikendarai Mbah Ponito, untuk melintas tanpa terjatuh. Kata Mbah Ponito:



Yainur Pratomo

“Jalan menuju sawah itu sulit. Terkadang, saya bisa terjatuh dua kali dari sepeda. Lumayan sering itu. Jalannya saja hanya sebesar irigasi kecil, jadi saat saya mengendarai sepeda, saya jadi tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak berani menaikinya,”



Sergio Capuzimati/Unsplash

Kurangnya Dialog Sosial

Tantangan lain berkaitan dengan kurangnya dialog sosial yang seyogyanya bisa mendorong proses partisipatif sehingga berkontribusi terhadap penyusunan kebijakan secara inklusif. Kajian ini menemukan bahwa petani lanjut usia mengalami kesulitan dalam menyampaikan kekhawatiran mereka tentang sistem penyakapan yang tidak setara di pertemuan desa. Pemerintah desa terus-menerus mengabaikan aspirasi petani lanjut usia untuk mengubah bagi-hasil dalam sistem penyakapan.

“Kepala desa terus diam. Dia tidak melakukan apa pun dan tidak menjawab tuntutan kami. Barangkali, dia juga merasa keberatan, dengan mertelu (bagi-hasil tiga perempat bagian), pemilik tanah hanya mendapat sepertiga dan buruh mendapat dua pertiga.”

Petani lanjut usia, laki-laki, 71 tahun

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan memberikan otonomi lebih besar dalam pengalokasian anggaran desa. Akan tetapi, masih ada beberapa tantangan besar terkait dengan eksklusi kelompok marginal serta kepentingan mereka. Musyawarah desa tahunan yang bertujuan membahas prioritas pembangunan desa hanya dihadiri oleh perangkat desa dan ketua RT/RW. Beberapa aspirasi dari akar rumput cenderung diasumsikan akan dibahas oleh perangkat desa dalam musyawarah desa.

“Orang biasa tidak akan mengikuti musyawarah desa di balai desa. Jika mereka ada masalah yang ingin disampaikan, masalah itu akan diutarakan oleh perangkat desa di musyawarah tersebut. Sayangnya, tidak satupun perwakilan kelompok tani hadir di musyawarah desa, sebab memang hanya dihadiri aparat pemerintah desa dan kepala desa.”

Informan kunci yang juga kelompok tani

Meski UU Desa No. 6/2014 mengakui peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perwakilan kelompok tani sudah seharusnya bisa hadir dalam musyawarah desa tersebut. Di sisi lain, seorang petani lanjut usia mengaku tidak pernah sekalipun menghadiri musyawarah desa, berharap bahwa perwakilan kelompok tani dapat menyampaikan aspirasinya di pertemuan tersebut.

“Saya belum pernah mengikuti musyawarah desa atau dusun. Kalau ada kekhawatiran, saya hanya akan meminta ketua kelompok tani untuk mewakili saya.”

Laki-laki, 68 tahun

Ageisme dan terbatasnya kesempatan untuk pengembangan keterampilan

Ageisme dipahami sebagai penyematan stereotip dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan usia mereka. Ageisme sering muncul di tempat kerja, lewat serangkaian tindakan dan perilaku diskriminatif terhadap lanjut usia. Pekerja lanjut usia mungkin menghadapi perilaku yang menganggap mereka kurang produktif, adaptif, dan canggih dibandingkan sejawatnya dari generasi yang lebih muda. Mereka mungkin tereksklusi dari kesempatan mendapatkan pelatihan atau promosi dan banyak contoh lain yang mengharuskan mereka pensiun dini. Lanjut usia membagi pengalaman mereka menghadapi stigma dan diskriminasi berdasarkan jenis-jenis kerja yang bisa mereka lakukan.

STUDI KASUS

Kontribusi lanjut usia perempuan terhadap lingkungan bersih, dan kurangnya kesempatan pengembangan keterampilan

In Di Tanjungrejo, Ngombol, permasalahan sampah dan kemarau panjang sangat mempengaruhi produksi padi. Petani perempuan lanjut usia mengeluhkan sampah yang dibuang sembarangan bisa menimbulkan pencemaran dan menyumbat saluran irigasi, diduga berasal dari desa sekitar. Awalnya, pemerintah melakukan pendekatan terhadap PKK dan mendorong partisipasi penuh dari perempuan lanjut usia untuk menyebarluaskan pengelolaan sampah dan kemudian menyediakan infrastruktur dasar dari bank sampah. Meski perempuan berhasil mengatasi persoalan sampah mereka sendiri, masyarakat dari luar desa masih sering membuang plastik sembarangan.

Perempuan lanjut usia menyampaikan rasa puas atas keterlibatan sukarela mereka dalam mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga, lantas mengirimkannya ke bank sampah. Mereka mengaku menikmati keterampilan baru dalam pengelolaan sampah dan menghasilkan kebaruan di sana. Mereka memilah berbagai jenis sampah plastik dan kertas sesuai kategorinya, lalu mencuci dan mengeringkannya terlebih dulu, sebelum akhirnya dikirim ke bank sampah. Partisipasi di bank sampah dapat membantu mengatasi permasalahan sampah.

Meski mereka termotivasi untuk mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan sampah, peserta lanjut usia cenderung terhambat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik di sektor ini, seperti peran-peran administratif. Mereka menghadapi stigma karena dianggap kurang berpendidikan dan mampu dibandingkan rekan-rekan mereka yang lebih muda.

Kanan: Perempuan lanjut usia berkeinginan untuk mengembangkan keterampilan baru tetapi kerap dihalangi.



Titis Puteri Ambarwati

Meski lanjut usia mampu menghasilkan inovasi dalam kegiatan berbasis alam, kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan cenderung rendah, sering dianggap mudah patuh serta kurang berpendidikan. Lanjut usia kerap terdiskriminasi dalam mengakses kesempatan kerja lebih baik, seperti peran-peran administratif. Di bank sampah, lanjut usia menghadapi prasangka tentang kekuatan fisik yang makin lemah di usia tua dibandingkan sejawatnya yang muda.

Seorang informan kunci dari sektor bank sampah membenarkan paham ageisme ini.

“Lanjut usia di bank sampah juga menghadapi prasangka bahwa mereka dianggap kurang mampu lantaran tubuhnya kian menua dibanding rekan-rekan mereka yang lebih muda di bank sampah.”

Informan Kunci

Perilaku diskriminasi usia ini juga muncul dari kesaksian informan kunci yang lain:

“Petani lanjut usia kami sangat lah patuh (manut-manut) karena mereka banyak yang tidak berpendidikan.”

Informan Kunci

“Anak muda memang lebih peduli terhadap sampah dibandingkan orang-orang yang lebih tua. Sekadar untuk merawat tubuh mereka saja, orang tua sudah mengeluh lelah, entah dibilang kakinya sakit atau sulit berjalan. Itu sebabnya kami memilih untuk mengumpulkan anak-anak muda (dalam pengelolaan bank sampah)”

Informan Kunci

Lantaran berlapis prasangka ini, lanjut usia cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah, seperti kesaksian informan kunci di kajian ini, dan memaklumi cara pandang tentang diri yang patuh dan tidak berpendidikan, membuat kapasitas mereka untuk mengembangkan keterampilan semakin berkurang. Ageisme bertindak sebagai penghalang besar bagi partisipasi lanjut usia, serta mengukuhkan anggapan negatif di masyarakat tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan lanjut usia. Absennya kebijakan untuk mendukung kerja layak, dibarengi dengan prasangka usia ini, melemahkan kesempatan kelompok usia lanjut untuk berpartisipasi di pelatihan, meningkatkan keterampilan, mengembangkan potensi, dan memperbaiki kehidupan mereka.



YAKKUM Emergency Unit

Seorang perempuan lanjut usia yang berpartisipasi dalam bank sampah

“Saya hanya orang bodoh; Saya hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan. Ketika saya disuruh mengumpulkan plastik, saya ikuti saja.”

Perempuan, 70 tahun



Fita Herawati

Dampak dari skema ekolabel

Bisnis berkelanjutan yang bisa berkontribusi terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial kini semakin diakui oleh konsumen sebagai isu utama. Sertifikasi ekolabel merupakan program pro-lingkungan yang menargetkan perusahaan dengan tujuan mensertifikasi produk-produk mereka supaya sesuai standard ekolabel, di mana logo ekolabel menjadi penanda kepedulian dan kepatuhan terhadap kelestarian lingkungan. Ekolabel di sektor kehutanan, misalnya, diamanatkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2002 yang fokus pada produksi ramah lingkungan dan pengelolaan hutan lestari.

Standard ekolabel barangkali bisa menyumbang penghasilan lebih baik bagi lanjut usia. Akan tetapi, mereka juga bisa menghalangi potensi lanjut usia untuk mempertahankan mata pencaharian melalui jual beli skala kecil dari hasil hutan non-kayu (NTFP). NTFP, seperti bambu atau tanaman musiman yang lain, sangatlah berarti bagi pemasukan rutin lanjut usia, namun lantaran skema ekolabel tidak mengikutsertakan NTFP, lanjut usia pun kesulitan memperoleh pemasukan yang cukup dari sana.

Di Karangrejo, Purworejo, hutan rakyat telah didukung dengan skema sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) di Indonesia, menyebabkan peningkatan permintaan komoditas kayu. Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) mengawasi skema ekolabel, yang beroperasi di bawah pengawasan perusahaan penebangan kayu. APHR berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mendapatkan izin dari Indonesian Legal Wood (ILW) dan Forest Stewardship Council (FSC), sehingga berpotensi memperluas permintaan ke pasar ekspor. Skema ini bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah desa dan kelompok tani agar mengeluarkan peraturan tentang penebangan pohon secara selektif, dengan kategori minimal kayu berdiameter 60 cm. Akan tetapi, ada risiko dari kebijakan ini di mana lanjut usia tereksklusi karena secara tradisional mereka cenderung memanfaatkan NTFP sebagai pemasukan daripada hasil hutan kayu. Selain itu, tenaga kerja intensif dalam pemanenan dan proses pasca panen baik di hasil hutan kayu maupun non-kayu membuat penghasilan mereka kurang mencukupi.

Seorang petani lanjut usia mengatakan:

“Buah dan daun pohon melinjo (yang tidak tercakup dalam standar ekolabel) tidak bisa dijual lagi. Petani tidak mau memanen buah melinjo, memilih membiarkannya membusuk. Sekalipun petani mau membayar pekerja pemanenan, harga hasil panen melinjo tidak akan mampu menutupi upah pekerja. Terakhir, saya menjual buah melinjo sekitar dua tahun lalu dengan harga sangat murah, hanya 1.000 rupiah per kilogram. Bukan 10.000 rupiah (sekitar \$0,6 USD), tapi 1.000 rupiah (sekitar \$0,06 USD)! Itu sebabnya, sampai saat ini, tidak satupun permintaan buah melinjo ada di pasar-pasar lokal. Ujung-ujungnya tidak ada yang mau memanennya.”

Laki-laki, 76 tahun

Kesimpulan dan rekomendasi

NbS semakin diakui sebagai komponen utama bagi upaya dunia untuk mencapai tujuan Deklarasi Rio, Target Perlindungan Keanekaragaman Hayati Aichi, Perjanjian Paris, Kerangka Pengurangan Risiko Bencana Sendai, dan SDGs. Penerapan NbS yang tersinergi dengan kerangka transisi berkeadilan mampu menjadi daya ungkit sebagai pendorong kerja layak, menciptakan nilai tambah yang nyata, meningkatkan ketangguhan, dan mendukung negara-negara dalam mencapai target nasional mereka.

This study highlighted the contribution that Kajian ini menyoroti sumbangsih lanjut usia dalam konservasi alam, respon atas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kajian ini juga mengulas defisit kerja layak yang secara berarti dihadapi lanjut usia saat menekuni pekerjaan NbS. Dalam rangka memanfaatkan potensi NbS sebagai saluran untuk transisi berkeadilan dan memajukan agenda kerja layak, serangkaian kebijakan utama dan langkah-langkah programatik diperlukan. Beberapa hal itu antara lain:

1. Memastikan penerapan upah minimum guna meningkatkan imbal-balik layak untuk pekerjaan NbS yang dilakukan lanjut usia.

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja di tingkat kabupaten perlu berupaya meningkatkan kesadaran (melalui kampanye publik) tentang ketentuan upah minimum di kalangan pekerja dan pengusaha sektor informal. Gubernur Jawa Tengah menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (amandemen tahun 2023), yang kemudian diadopsi oleh berbagai kabupaten di provinsi tersebut. Pada 2024, upah minimum provinsi adalah 2.036.947 rupiah (\$128 USD) per bulan. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum ini memang sangat menantang di wilayah perdesaan, sehingga pemerintah desa juga perlu menyediakan bantuan hukum untuk mendukung pekerja informal yang berpenghasilan di bawah upah minimum.

2. Memastikan pembentukan koperasi, sesuai potensinya untuk mengelola standar ekolabel berbasis masyarakat, dalam rangka memperbaiki penghasilan di pekerjaan NbS yang dilakukan lanjut usia.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat kabupaten, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, memfasilitasi kelompok tani untuk mengembangkan koperasi sebagai usaha sosial dengan pembagian sisa hasil usaha yang setara sesuai kesepakatan anggotanya. Dinas Koperasi dapat mendukung kelompok tani untuk mempelajari sistem koperasi dari koperasi berstandar ekolabel yang sudah ada, seperti Koperasi Wana Lestari Menoreh (koperasi hutan rakyat) di Kulon Progo, Yogyakarta. Koperasi dapat memberi layanan kredit mikro dengan jaminan pohon bagi anggota yang membutuhkan dana mendesak dan dapat menyediakan jual-beli NTFP, seperti empon-empon kering dan bambu, dengan harga lebih baik.

3. Program perlindungan sosial yang ada, seperti PKH-Lansia dan BPNT, semestinya bersifat inklusif

Menyikapi tidak meratanya keikutsertaan lanjut usia dalam PKH-lansia dan BPNT, Kementerian Sosial sebaiknya memperbaharui database penerima PKH-Lansia dan BPNT dengan mengikutsertakan mereka yang bekerja di NbS, maupun pekerja informal lain di perdesaan. Rekomendasi ini selaras dengan pensiun sosial semesta (universal social pensions) yang telah diterapkan di Provinsi Aceh, meskipun ada kendala fiskal dari pemerintah pusat. Mengikuti jalur ini, Provinsi Jawa Tengah juga perlu menyediakan anggaran untuk program pensiun sosial semesta. Pemerintah desa juga dapat mengambil peran dengan mengoptimalkan peran kader kesehatan berbasis komunitas (Posyandu) dalam rangka mengenalkan hak lanjut usia atas pensiun sosial semesta.

4. Kementerian Kesehatan harus mendorong dan memastikan cakupan kesehatan semesta bagi lanjut usia:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu memastikan keterlibatan penuh lanjut usia yang menekuni NbS maupun sektor informal lainnya ke dalam BPJS-PBI. Rekomendasi ini sejalan dengan target SDG 3.8 untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage). Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, iuran peserta PBI ditanggung pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan pemerintah daerah melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dalam konteks ini, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan intervensi terhadap partisipasi warga lanjut usia yang bekerja di NbS dan sektor informal untuk mengakses BPJS-PBI. BPJS, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, juga dapat melibatkan kader Posyandu untuk melakukan sosialisasi tentang hak lanjut usia atas layanan BPJS-PBI dan membantu mereka yang belum terdaftar.

5. Dalam rangka menjamin keselamatan kerja bagi pekerja NbS informal di perdesaan, pemerintah desa seyogyanya mengalokasikan dana desa untuk mendaftarkan para pekerja lanjut usia ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan untuk menjangkau 70 juta peserta di perdesaan yang bekerja di sektor informal pada 2026, melalui program “Kerja Keras Bebas Cemas” yang menawarkan kemudahan pendaftaran dan iuran yang terjangkau. Pemerintah desa perlu menimbang untuk menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan ini, mulai Rp 16.800 per bulan melalui alokasi Dana Desa lantaran UU Desa Nomor 6/2014 menjamin otonomi pemerintah desa. Di sini juga dibutuhkan inisiatif dari tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai manfaat BPJS-Ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor informal.

6. Mendorong anggaran desa yang inklusif dan peka terhadap kebutuhan lanjut usia demi menjamin keselamatan kerja mereka di alam.

Anggaran desa harus memprioritaskan dan mendukung desain infrastruktur serta lingkungan kerja yang ramah lanjut usia. Dalam konteks ini, pemerintah desa juga mendukung pengembangan kelompok swadaya antargenerasi demi membantu masyarakat lanjut usia mengatasi hambatan infrastruktur yang ada.

7. Memastikan ketaatan pada kebijakan pasar tenaga kerja aktif demi mengembangkan keterampilan lanjut usia dalam pekerjaan informal NbS:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia mencakup program ketenagakerjaan dan pelatihan kejuruan (vokasi). Peraturan ini juga terkait dengan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif (ALMP), yang memungkinkan pekerja lanjut usia mengakses pelatihan dan pemberi kerja menerima insentif untuk mempekerjakan atau mempertahankan pekerja berusia lanjut. Program pelatihan kejuruan yang ada mencakup pelatihan peningkatan keterampilan secara online (dikenal sebagai Kartu Prakerja) ditargetkan untuk melatih kembali satu juta orang dewasa berusia 18-64 tahun yang menganggur dan berpenghasilan rendah. Anggota keluarga yang lebih muda dapat membantu anggota keluarga yang lebih tua dalam mendaftarkan partisipasi mereka secara online, mengarahkan mereka untuk mengikuti program tertentu dan menerima anggaran pelatihan sebesar 3,5 juta rupiah (\$245 USD) untuk memilih kursus yang relevan dengan platform digital. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta menerima sertifikat dan kemungkinan besar akan didorong untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

8. Kementerian Tenaga Kerja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Kementerian Kesehatan harus mendukung kampanye melawan diskriminasi usia dan mengutamakan hak-hak pekerja lanjut usia di perdesaan:

Dekade Penuaan Sehat dari PBB, yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2030, mempromosikan kampanye penuaan sehat dan mengajak pemerintah serta seluruh stakeholder untuk menentang ageisme melalui perubahan kebijakan dan perundangan, kegiatan pendidikan, dan membina interaksi antargenerasi. Salah satu aspek penting dalam mempromosikan kampanye menentang ageisme ialah kampanye tentang hak lanjut usia untuk terus bekerja dan meningkatkan keterampilan guna memampukan mereka beradaptasi dengan pekerjaan NbS di masa depan. Tujuan potensial lainnya dari kampanye ini adalah untuk mempromosikan insentif bagi pemberi kerja yang saat ini menerapkan peraturan pasar tenaga kerja yang ketat supaya lebih terbuka dalam mempekerjakan dan mempertahankan para pekerja berusia lanjut.

9. Kolaborasi antargenerasi dalam kelompok NbS harus diperkuat:

Kelompok antargenerasi dibutuhkan untuk mendukung pemberdayaan lanjut usia dalam pekerjaan NbS. Klub antargenerasi yang sudah ada ini resmi diusung oleh BKKBN, dikenal dengan nama Bina Keluarga Lansia. BKKBN mengembangkan kelompok antar generasi yang beranggotakan lanjut usia dan anggota keluarga yang lebih muda. Beberapa klub antargenerasi seperti BKL ini mengelola kredit mikro berbasis masyarakat (arisan) dengan dana awal dari anggaran BKKBN atau pemangku kepentingan pemerintah lainnya. Beberapa juga menyelenggarakan seni pertunjukan tradisional, dan kegiatan lain yang berfokus pada komunikasi antargenerasi dan berbagi pengetahuan. Salah satu peran penting dari klub antargenerasi ini adalah anggota muda dari kelompok ini dapat mendigitalkan informasi tentang jasa ekosistem dan membantu para lanjut usia supaya dapat mengakses pemasaran secara daring.

10. Dialog sosial dan proses pengambilan keputusan yang inklusif harus dikedepankan, mengangkat kesenjangan sistem penyakapan:

Kajian ini menemukan bahwa musyawarah desa belum mampu mengatasi kesenjangan struktural yang dialami lanjut usia. UU Desa Nomor 6/2014 mensyaratkan adanya pelibatan warga termasuk petani, nelayan, kelompok perempuan, dan kelompok marginal lain dalam musyawarah perencanaan dan penganggaran desa. Akademisi dan/atau masyarakat sipil harus mengkaji ketentuan musyawarah sosial yang inklusif pada UU Desa Nomor 6/2014, sebab lanjut usia miskin yang bekerja di bidang pertanian dan kehutanan belum mendapat faedah atas itu. Pemangku kepentingan diminta untuk tidak hanya membantu perihal teknis pertanian organik atau jenis pekerjaan NbS lainnya, tetapi juga mengatasi masalah kesenjangan bagi hasil antara petani penyakap dan pemilik tanah.



Dewi Puspita Amarta Yahya/Unsplash

Temukan lebih lanjut di:
www.helpage.org/resource/decent-work-in-nature-based-solutions-in-indonesia/

HelpAge International adalah organisasi global yang mempromosikan hak lanjut usia agar bisa hidup lebih bermakna, sehat dan aman.

HelpAge International
 PO Box 78840,
 London SE1P 6QR, UK

Tel +44 (0)20 7278 7778
info@helpage.org
www.helpage.org

Registered charity no. 288180

Ditulis oleh Ciptaningrat Larastiti,
 Bondan Sikoki, Sylvia Szabo, Fita Herawati,
 dan Titis Puteri Ambarwati.

Masukan diberikan oleh
 Jessica Petitprez, Federica Foidadelli,
 Jemma Stovel, Javeria Afzal dan
 Luke Tumelty.

Diterjemahkan oleh Ragil Safitri dan
 Ciptaningrat Larastiti

Design by TRUE www.truedesign.co.uk



Copyright © HelpAge International 2024
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

Any parts of this publication may be reproduced without permission for non-profit and educational purposes. Please clearly credit HelpAge International and send us a copy or link.

Pustaka

- ILO and IUCN. (2022). *Decent Work in Nature-based Solutions*. Geneva: Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- OECD. (2018). What is green growth and how can it help deliver sustainable development?, available at: www.oecd.org/greengrowth/whatisgreengrowthandhowcanithelpdeliversustainabledevelopment.htm
- The Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (PN/Bappenas). (2018). *GOI Commitment to Low Carbon Development and Green Economy Jakarta*, available at: <http://greengrowth.bappenas.go.id/en/goi-committed-to-low-carbon-development-and-green-economy/>
- Institute GGG. (2024). *Sustainable Landscapes Drive Indonesia to Achieve its FOLU Net Zero Goals*, available at: <https://gggi.org/sustainable-landscapes-drive-indonesia-to-achieve-its-folu-net-zero-goals/>
- Ministry of National Development Planning (BAPPENAS). National Action Plan for Climate Change Adaptation. (2014)
- Case Studies Platform. *Conservation, forest restoration, and organic soil nutrient management in mountain ecosystems*: University of Oxford, available at: <https://casestudies.naturebasedsolutionsinitiative.org/casestudy/conservation-forest-restoration-and-organic-soil-nutrient-management-in-mountain-ecosystems/>
- Case Studies Platform. *Reversing land and soil degradation through reforestation*: University of Oxford, available at: <https://casestudies.naturebasedsolutionsinitiative.org/casestudy/reversing-land-and-soil-degradation-through-reforestation/>
- Association S. (2024). *What is Agroforestry?* [cited 2024 05 February]
- Trust W. (2024). *Agroforestry Benefits Nature, Climate, and Farming*, available at: www.woodlandtrust.org.uk/plant-trees/agroforestry-benefits/
- Lieuw-Kie-Song MaP-C, Vanessa. (2020). *Nature hires: how nature-based solutions can power a green jobs recovery*, available at: www.ilo.org/publications/nature-hires-how-nature-based-solutions-can-power-green-jobs-recovery
- Breman J. A. (2023). *Short History of the Informal Economy*. *Global Labour Journal*. 2023;14(1)
- Statistic Indonesia (BPS). (2023). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. In: *Statistic Indonesia (BPS)*, editor. Jakarta 2023
- Suriastini NW et al. (2023). *Examining decent work in Indonesia: Experiences of older rural women entrepreneurs in Central Java*. *SurveyMETER and HelpAge International*, available at: www.helpage.org/news/addressing-barriers-to-decent-work-in-indonesia/
- ILO. *Decent Works Country Program for Indonesia 2020–2025*. ILO, Kemnaker, APINDO, KSBSI, KSPI, SPSI, SARBUMUSI, KSPN; 2020
- Statistic Indonesia (BPS). (2023). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. In: *Statistic Indonesia (BPS)*, editor. Jakarta 2023
- Statistic Indonesia (BPS). (2023). *Purworejo Elderly Profile for 2022/2023 (Profil Lansia Purworejo Tahun 2022/2023)*. In: *Purworejo BPSK*, editor. Purworejo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo
- IUCN.(2024). *Nature-based solutions*, available at: <https://iucn.org/our-work/nature-based-solutions>
- ILO. (2024). *Decent work*, available at: www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang-en/index.htm
- UNFCCC. (2024). *Slow Onset Events*, available at: <https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/WIMExCom/SOEs>
- WMO. (2024). *Extreme weather*, available at: <https://wmo.int/topics/extreme-weather>
- WHO. (2021). *Global report on ageism*, available at: <https://iris.who.int/handle/10665/340208>. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- Bappeda L. *Organic Rice in Kedung Pucang Village Started to Grow in 2021 (Padi Organik di Desa Kedung Pucang Mulai Berkembang 2021)* [December 07, 2023]. available at: <https://bappedalitbang.purworejokab.go.id/padi-organik-di-desa-kedung-pucang-mulai-berkembang>
- Shiva V. *Who really feeds the world?: The failures of agribusiness and the promise of agroecology*: North Atlantic Books (2016)
- Purworejo P. (2022). *Regent Appreciated the Waste Bank Management in Tanjungrejo Village: Official Portal of Purworejo Regency (Bupati Apresiasi Pengelolaan Bank Sampah Desa Tanjungrejo: Portal Resmi Kabupaten Purworejo)*, available at: <https://purworejokab.go.id/web/read/2334/bupati-apresiasi-pengelolaan-bank-sampah-desa-tanjungrejo.html>
- Rahayu SM, Syuhriatin W. *Keanekaragaman. (2018). Mangrove Biodiversity in Gedangan Village, Purwodadi District, Purworejo Regency, Central Java (Mangrove Di Desa Gedangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*. *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan*. 2018;9(17): pp.32–41
- ILO. (2022). *Decent Work Deficits Among Rural Workers*, available at: www.ilo.org/publications/decent-work-deficits-among-rural-workers
- Henry C. (2020). *Decent Work in Agriculture: Tracing core labour rights*. In: Department ISP, editor. 2020
- Pertanian DKPd. *Distabun Jateng Adakan Sosialisasi Sertifikasi Padi Organik 2022*, available at: <https://dkpp.purworejokab.go.id/distanbun-jateng-adakan-sosialisasi-sertifikasi-padi-organik>
- ILO. *Decent Works Country Program fo Indonesia 2020-20205*. ILO, Kemnaker, APINDO, KSBSI, KSPI, SPSI, SARBUMUSI, KSPN; 2020
- The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan or TNP2K) (2022). *The Future of Indonesia's Social Protection System: Social Protection for All*, available at: www.tnp2k.go.id/downloads/the-future-of-the-social-protection-system-in-indonesia
- WHO. (2021). *Global report on ageism*, available at: <https://iris.who.int/handle/10665/340208>. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- Saraswati AW. *ESG: The Future of Sustainable Investment*, available at: <https://greeneration.org/en/publication/green-info/esg-the-future-of-sustainable-investment/>
- Razif, M. and Persada, S.F. (2016). *Environmental Impact Assessment (EIA) Framework for Ekolabel Certification Initiative in Indonesia: Case Study of a Rattan-Plywood Based Furniture Industry*, *International Journal of ChemTech Research*, 9(04)
- Huda K. (2017). *A small social pension in Indonesia has a big impact*: HelpAge; available at: www.helpage.org/blog/a-small-social-pension-in-indonesia-has-a-big-impact/